

Demokrasi Mahasiswa Universitas PGRI Palembang yang Dilaksanakan oleh Organisasi Mahasiswa (ORMAWA)

Boby Agus Yusmiono

Universitas PGRI Palembang

Email: bobyagusyusmiono@yahoo.com

Abstract

Intention of this research is to understanding the role of PGRI university Palembang to elevate democracy to its student. This method research use the quantitative research procedure [is] way of measurement by using traditional Scale Guttman model (cross sectional) in the form of number, percentage. The result of research show that the opinion from interview by 30 are manager Ormawa in environment of PGRI university Palembang, that is from result interview shall be as follows (1) indicator of college student knowledge to knowledge democratize that is equal to 64,75%, in meaning enough its Knowledge in democratizing. (2) Indicator of student involvement in campus democracy that is equal to 39,40%, meaning students are do not got mixed up with by a campus democracy in PGRI university Palembang. (3) Assessment Indicator of equal to 21,67% meaning campus democracy in PGRI university Palembang assessed is not effective and efficient. (4) indicator of freedom Expectation democratize equal to 68,20%, meaning Ormawa hope to own the role and freedom creativity in democratizing PGRI university Palembang.

Keywords: democracy in the university, student participation, student organization

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami peran universitas PGRI dalam meningkatkan demokrasi kepada mahasiswanya. Metode penlitian ini menggunakan prosedur penelitian kuantitatif cara pengukuran dengan menggunakan Skala Guttman model tradisional (cross sectional) dalam bentuk angka, persentase. Hasil penelitian menunjukkan pendapat dari wawancara dengan 30 pengurus Ormawa di lingkungan Universitas PGRI Palembang, yaitu dari hasil wawancara adalah sebagai berikut (1) indikator Pengetahuan Mahasiswa terhadap pengetahuan demokrasi yaitu sebesar 64,75%, dalam arti cukup Pengetahuan nya dalam berdemokrasi. (2) Indikator keterlibatan mahasiswa dalam demokrasi kampus yaitu sebesar 39,40%, berarti mahasiswa tidak begitu terlibat dalam demokrasi kampus di Universitas PGRI Palembang. (3) Indikator Penilaian sebesar 21,67% berarti demokrasi di Universitas PGRI palembang dinilai tidak efektif dan efisien. (4) Indikator harapan kebebasan berdemokrasi sebesar 68,20%, berarti ORMAWA berharap memiliki peranan dan kebebasan berkeaktifitas dalam berdemokrasi di Universitas PGRI Palembang.

Kata kunci : demokrasi kampus, partisipasi mahasiswa, organisasi kemahasiswaan

PENDAHULUAN

Banyak ikrar kebangsaan sebuah negara di sandingkan dengan kata pemuda salah satu contohnya Sumpah Pemuda. (Tugiyono, 2004). Pemuda memiliki gerak yang sangat dinamis sehingga tidak salah kebanyakan orang menyebut bahwa motor penggerak perjuangan suatu bangsa diikrarkan oleh pemuda. Pemuda mengandung makna yang sangat mendalam yakni perjuangan yang berkelanjutan dan berkesinambungan, Pemuda bisa menjadi korban dari kebijakan-kebijakan jika tak adil karena pemuda selalu berada ditengah-tengah kepentingan. Pemuda adalah regenerasi yang harus tetap tumbuh, walaupun dalam keadaan susah paya. Sehingga tidak salah penggerak perjuangan suatu bangsa diperjuangkan oleh pemuda. Tidak hanya di Indonesia banyak di negara-negara lain selalu mengikut sertakan pemuda. Negara adidaya seperti Amerika Serikat tak lepas dari ikut serta pemudanya.

Dahulu pemuda mengenal perjuangan bangsa Indonesia dengan mengikat senjata untuk berperang. Tetapi ketika sudah merdeka, pemuda harus belajar dengan baik, untuk memajukan negara ini. Sekarang zaman globalisasi, pemuda memiliki tatangan yang sangat besar, pendidikan memiliki daya saing begitu ketat baik dari lokal, nasional bahkan dikancah global. Kemajuan sebuah bangsa tidak akan bisa selamanya mengandalkan sumber daya alam. Sehingga dibutuhkan pendidikan untuk mencetak sumber daya manusia yang handal siap bersaing mengikuti perkembangan zaman.

Pemuda menjati dirinya sebagai mahasiswa. Pemuda merupakan harapan bangsa sehingga tidak salah mengatakan "mahasiswa merupakan harapan bangsa". Mahasiswa harus bisa menyampaikan aspirasinya. Hal ini, dikarenakan mahasiswa sudah dimasuki sendi-sendi kehidupan demokrasi. Penerapan demokasi di Universitas merupakan karakter untuk pembelajaran demokrasi terutama dikalangan mahasiswa. Oleh karena itu, mahasiswa harus menerapkan norma-norma, adat istiadat, dan sopan santun. Sehingga demokrasi di mahasiwa memiliki karakter.

Dari paparan diatas peneliti tertarik untuk meneliti Konsep Demokrasi Mahasiswa di Lingkungan Universitas PGRI (Study kasus tentang demokrasi mahasiswa Universitas PGRI Palembang, Sumatera Selatan). Dari latar belakang tersebut dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut : Bagaimana Universitas PGRI Palembang merealisasikan konsep demokrasi mahasiswa ?. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan, untuk memahami peran universitas PGRI dalam menghadirkan demokrasi kepada mahasiswanya.

METODE PENELITIAN

Penelitian Skala Guttman tradisional adalah penelitian bila ingin mendapatkan jawaban yang tegas terhadap suatu permasalahan ditanyakan, dan selalu dibuat dalam pilihan ganda yaitu "ya dan tidak", "benar dan salah", "positif dan negative", untuk penilaian jawaban misalnya untuk jawaban positif diberi skor 1 sedangkan jawaban negative diberi skor 0 dengan demikian bila jawaban dari pertanyaan adalah setuju diberi skor 1 dan tidak setuju diberi skor 0 bila skor dikoversikan dalam

persentase maka secara logika dapat dijabarkan untuk jawaban setuju skor $1 = 1 \times 100\% = 100\%$, dan tidak setuju diberi skor $0 = 0 \times 0\% = 0\%$.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dengan runtuhnya komunisme, mengubah cara berfikir ilmu sosial seperti *Jurgen Habermas*. Dia tidak lagi mengkritik terhadap kapitalisme, melainkan membuat buku-buku yang isinya menganalisa proses demokrasi dalam era pasca komunis. Demokrasi mengharapkan mewujudkan masyarakat yang tersusun secara otonom dan secara sentral tidak lagi diletakkan pada sebuah ideologi monologal (ditentukan satu arah). Di demokrasi menuntut setiap warga bisa mempengaruhi pengambilan keputusan publik. Sehingga menciptakan sebuah ruang publik.

Ruang publik merupakan konsep yang dewasa ini menjadi populer didalam ilmu sosial khususnya teori-teori demokrasi. Demokrasi mengakibatkan menciptakan ruang publik yang plementasinya mengakibatkan masyarakat masuk ke sebuah globalisasi (awal abad ke-20). hal ini, mendorong partisipasi seluruh warga negara mengubah prektek sosial dan politik mereka. Globalisasi sangat populer diabad ini (Ali, 2009).

Globalisasi membawa dampak terhadap dunia pendidikan, terutama sebagai suatu wahana untuk mempersiapkan SDM yang mampu mengendalikan dan memanfaatkan perubahan-perubahan yang diakibatkan oleh proses globalisasi itu. Pendidikan menyaipkan peserta didik dengan kompetensi-kompetensi yang diperlukan bagi kehidupan salah satunya yaitu penerapan demokrasi. Globalisasi merupakan suatu kenyataan yang tak bisa dihindari. Menurut Bhagwati dalam buku Mohammad Ali (2004), menghadapi globalisasi ini tergantung pada bagaimana seseorang memaknainya.

Dalam dunia pendidikan, misalnya memaknai globalisasi secara positif, seperti globalisasi berakibat perlunya pendidikan standar internasional, dan memaknai globalisasi secara negative, seperti rentannya pengaruh budaya asing yang bertentangan dengan norma yang dipegang oleh masyarakat. Budaya merupakan identitas suatu bangsa ditengah-tengah arus globalisasi. Budaya bisa menjadi atribut masyarakat untuk dikenal oleh negara luar (global) sebagai ciri khas dari Negara Indonesia. Contohnya angklung, batik, kain tenun merupakan ciri khas bangsa Indonesia.

1. Ideologi Demokrasi

Ideologi demokrasi adalah mempertahankan pluralismenya (melindungi pluralisme yakni cara-cara hidup subkultur-subkultur, orientasi-orientasi kepercayaan dan hak-hak untuk melindungi wilayah-wilayah privat (Hardiman, 2007). Pluralisme juga sering diistilahkan sebagai ruang privat. Jika kita melenyapkan ruang privat itu sama saja menghilangkan setiap kesempatan untuk mencapai pemahaman bersama. Dengan kata lain, demokrasi memberikan setiap individu di dalam ruang privatnya masing-masing, supaya proses kreasi makna di dalam dunia dapat terus berjalan. Pluralisme disini dapat dipahami sebagai ruang cerita berbagai peristiwa yang dialami manusia.

Cerita ini tidak tinggal dibungkam didalam kesunyian ruang privat, melainkan keluar untuk menjadi bagian dari kehidupan ruang publik. Dengan terciptanya wadah opini dimana setiap wacana dapat muncul secara bebas. Melalui cara ini, publik dapat dicerdaskan karena memiliki banyak alternatif pemikiran dalam pengambilan keputusan.

Konsep pluralisme merujuk pada praktek pertukaran pendapat dan diskusi seputar isu-isu masalah sosial bersifat umum. Pluralisme juga berhubungan dengan pembentukan kesadaran yang bukan sekedar bersifat kongret, melainkan suatu yang sifatnya juga abstrak secara kultural (budaya) dalam kehidupan sehari-hari.

Pancasila merupakan gagasan bernegara Indonesia, dan baiklah disajikan kembali asas-asas utamanya. Demokrasi Pancasila dikatakan tidak individualistis dan juga tidak liberal ; tidak didasarkan sekelompok atau golongan. Demokrasi pancasila bersifat “mono-dualistis artinya orang yang secara individual maupun bersama terintegrasi dalam komunitas mereka. Demokrasi Pancasila juga bersifat konstitusional (Niels, 2005).

Kemimpinan Pancasila menggerakkan bangsa menuju tujuan-tujuannya, dan disahkan oleh penerapan demokrasi Pancasila yang konsisten; kepemimpinan ini juga diungkapkan dalam hubungan pemerintahan dengan organisasi sosial. Keputusan dicapai melalui diskusi atau musyawarah, bukan melalui kekerasan atau pemaksaan; keputusan seperti itu mencerminkan memperkecil seia-seketa antara kelompok mayoritas dan minoritas yang saling bertentangan kepentingan.

2. Sistem Demokrasi

Sistem demokrasi berkaitan erat dengan Undang-undang dasar 1945 dalam hal ini kita harus percaya kepada kekuatan rakyat, keuletan rakyat, potensi rakyat yang diuji sejak tahun 1945 (saat Indonesia merdeka). Rakyat sudah dihadapi banyak tantangan untuk kemajuan dari suatu bangsa. Pasal 28 undang-undang dasar 1945 berbunyi “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.

Sistem Demokrasi adalah sebuah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pluralisme menciptakan sebuah *Regierung der Regierten* (pemerintahan oleh yang diperintah). Hal ini, menciptakan pemilihan diantara pluralisme secara alternatif dan rasional (Hardiman, 2007). Bhinneka Tunggal Ika artinya walaupun berbeda-beda tetap satu. Hal ini suatu sifat dari pluralisme yang ada sebagai jalan alternatif yang didapat dari sebuah berserikat dan berkumpul. Berserikat dan berkumpul dapat memecahkan dari suatu permasalahan untuk mendapati suatu kesepakatan.

Sistem demokrasi terjadi kesepakatan bersama mematuhi aturan-aturan penyelenggaraan sebuah diskusi rasional dimana setiap klaim kebenaran dapat diuji kebenarannya, ketepatan, terbebas dari melarang permainan kepentingan ekonomi, primodialisme, etnosentrisme, dan berbagai fanatisme sempit (Sudibyo, 2001).

Demokrasi lokal adalah inisiatif warga untuk mendorong demokrasi, memberdayakan organisasi warga, serta memperkuat demokrasi lokal. Demokrasi membutuhkan keterlibatan

masyarakat secara lebih luas dalam mengambil keputusan-keputusan. Demokrasi pada taraf lokal dapat membantu demokrasi pada taraf regional dan nasional.

Jika pemilihan adalah peristiwa demokrasi yang berlangsung secara nasional dan lokal (bersifat terbatas) yang terjadi di suatu kelompok kecil masyarakat Indonesia. Jangan sampai demokrasi lokal (terbatas) ini ‘dibajak’. Gerakan mahasiswa untuk membangun system demokrasi yang konstitusional dan terlembaga (yang dilindungi oleh hukum). Demokrasi mahasiswa mengatasnamakan BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa). Perpaduan antara demokrasi lokal, regional dan nasional diperukan beberapa pendekatan. antara lain:

Pertama, sejauh mana demokrasi lokal, regional dan nasional berhasil dikembangkan, dan sejauh mana demokrasi lokal bisa diintegrasikan dalam prosedur. **Kedua**, sejauh mana demokrasi regional dan nasional yang dibangun berdasarkan demokrasi lokal tersebut mampu menciptakan sksistensi masyarakat lokal secara politik, ekonomi, dan kultural dalam masyarakat. Dan **ketiga**, sejauh mana manajemen pemerintah melakukan distribusi sumberdaya ekonomi, politik dan ekonomi lintas lokal sehingga tetap relevan untuk mendukung negara-bangsa. (Syamsudin, 2007).

Demokrasi membedakan antara “demokrasi substansif” dan “demokrasi prosedural”. Biasanya mengatakan bahwa demokrasi secara prosedural memang sudah terpenuhi, tapi substansifnya belum, padahal “demokrasi substansi” itulah yang sejati dan karenanya harus diciptakan. (Hamid, 2006).

3. Demokrasi Mahasiswa

Pentingnya memupuk kemampuan dan integrasi mahasiswa secara tidak langsung di perguruan tinggi dengan cara mahasiswa berlomba-lomah belajar dengan baik, dibidang akademiknya untuk mendapat pengakuan akan kedudukan perannya didalam masyarakat. Dimana mahasiswa menyadari untuk merubah kehidupannya melalui pendidikan.

Peran mahasiswa dalam berdemokrasi sangat menarik untuk dikaji. Sebagai koponen masyarakat menitik beratkan kepada idealisme melalui intelektual di masa mudanya. Masa mudanya mengartikan dirinya sebagai harapan penerus kemajuan suatu bangsa di masa yang akan datang. Sehingga tidak berlebihan jika mengatakan mahasiswa sebagai sosok yang ideal penerus dari pada demokrasi yang memiliki kesadaran dari pada integrasi bangsa. Perguruan tinggi adalah sarana dari mahasiswa memahami makna dari demokrasi. Hal ini sudah jelas kemampuan dari pada mahasiswa di asah atau terbentuk dari perguruan tinggi tersebut.

Dalam sebuah penelitian kualitatif dari Hasse J berjudul “Anarkisme Demonstrasi Mahasiswa : Studi Kasus Pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar” dengan hasil penelitian sebagai berikut ;

Kekerasan dan Mahasiswa dalam Demonstrasi *pertama*, anarkis mahasiswa yang sampai berakhir di pihak berwajib. Atau sering disebut dengan istilah militan dan puritan. *Kedua*, Pengumpulan mahasiswa untuk melakukan demonstrasi secara massa. *Ketiga*, Kental dengan

ideologi dan spiritualis. *Keempat*, tidak adanya koordinasi dengan kampus atau perguruan tinggi lain ketika mahasiswa bertindak unjuk rasa.

Faktor Pemicu Kekerasan *pertama*, struktural. *Kedua*, kekerasan. Struktural adalah aturan-aturan yang membuat matinya kemampuan dari pada mahasiswa. Sehingga kekerasan itu timbul, untuk mahasiswa mempertahankan jati dirinya.

Pemecahan Persoalan mahasiswa yaitu *pertama*, Memaksimalkan Kegiatan melalui Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). *Kedua*, Melibatkan Mahasiswa dalam Aktivitas Kampus (Hassen, 2012). Selanjutnya sebuah penelitian kuantitatif dari Fadhilah dan Nuraina berjudul “Penerapan Demokrasi Di Lingkungan Gerakan Mahasiswa UNISMA Bekasi” dengan hasil penelitian sebagai berikut ;

Perspektif filsafat dengan 3 aspek landasan epistemologi, ontologi dan aksiologi, maka nilai penerapan demokrasi di Lingkungan Organisasi Gerakan Mahasiswa UNISMA yang paling tinggi adalah bahwa dari segi aspek epistemologi. Artinya mahasiswa hanya memahami konsep demokrasi. Sedangkan penerapan ontologi (hakiki demokrasi) masih rendah (Fadhilah, 2011).

Selanjutnya sebuah penelitian kuantitatif dari Adlin dan Syafri Harto berjudul “Pemetaan Sikap Demokratis Mahasiswa Baru Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau Tahun 2012” dengan hasil penelitian sebagai berikut ;

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden berkomitmen untuk bersikap demokratis. Mayoritas responden berkomitmen melakukan kegiatan politik non konvensional berupa berkomitmen menyampaikan aspirasi secara tertulis dimedia massa (75%), di ikuti kesediaan untuk menunaikan kewajiban demokratis berupa ikut serta dalam pemilu (25%). Selanjutnya mayoritas responden berkomitmen rendah untuk melakukan aktivitas politik non konvensional berupa menyegel kantor pemerintah, memblokir jalan dan menulis tulisan di tembok sebagai bentuk protes (Adlin, 2012).

4. Organisasi Mahasiswa Universitas PGRI Palembang

Universitas PGRI Palembang memiliki banyak organisasi, namun dalam penelitian ini peneliti hanya meneliti beberapa organisasi yaitu 13 organisasi kemahasiswaan termasuk didalamnya Himpunan mahasiswa FKIP, BEM Fakultas FKIP, BEM Universitas dan LDK AR-RISALAH. Tiga belas organisasi kemahasiswaan Universitas PGRI Palembang yang akan diteliti adalah sebagai berikut: 1. Himpunan Mahasiswa FKIP, 2. HMPS Pendidikan Bahasa dan Sastra Inggris, 3. HMPS Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, 4. HMPS Pendidikan Matematika, 5. HMPS Pendidikan Fisika, 6. HMPS Pendidikan Sejarah, 7. HMPS Pendidikan Akuntansi, 8. HMPS Pendidikan Geografi, 9. HMPS Pendidikan Bimbingan Konseling, 10. HMPS Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, 11. HMPS Pendidikan Sendratasi, 12. BEM FKIP Universitas PGRI Palembang, 13. BEM Universitas PGRI Palembang.

Berdasarkan angket dengan 30 pengurus organisasi mahasiswa yang ada dilingkungan universitas PGRI Palembang, mereka memiliki pendapat yang beragam namun intinya sama yaitu demokrasi mahasiswa universitas PGRI Palembang, demokrasi perwakilan. Terlihat dari pada

saat MUBES hanya perwakilan mahasiswa saja, contohnya pada MUBES BEM FKIP yang hadir hanya pengurus HMPS, pada MUBES HMPS yang hadir hanya perangkat kelas.

Angket terstruktur dengan menggunakan beberapa pertanyaan dan alternatif jawaban kepada 30 orang informan dengan mengangkat indikator dari Demokrasi yaitu pengetahuan, keterlibatan, penilaian dan kebebasan, maka hasil yang ditemukan adalah sebagai berikut;

TABEL 6
TABULASI ANGKET UNTUK SETIAP INDIKATOR

No	Pertanyaan	Persentase	
		Ya	Tidak
1	Pengetahuan	64,75 %	35,25 %
2	Keterlibatan	39,40 %	60,60 %
3	Penilaian	21,67%	78,33 %
4	Kebebasan	68,20%	31,80 %
		48,51 %	51,49%

Berdasarkan tabel diatas disimpulkan bahwa indikator pengetahuan memiliki persentase sebesar 64,75%(Ya) dan 35,25% (Tidak) berarti pengetahuan mahasiswa Sebagian Besar tentang demokrasi sudah cukup baik. Keterlibatan memiliki persentase sebesar 39,40% (Ya) dan 60,60% (Tidak) berarti Hampir Setengah dalam demokrasidi kampus mahasiswa tidak terlibat. Penilaian memiliki persentase sebesar 21,67% (Ya) dan 78,33% (Tidak) berarti Hampir Setengah Hanya menyatakan penilaian terhadap demokrasi mahasiswa tidak efektif dan efisien. dan Kebebasan demokrasi memiliki persentase sebesar 68,20% (Ya) dan 31,80% (Tidak), berarti mahasiswa Sebagian Besar mengharapkan adanya kebebasan ORMAWA dalam mengaktualisasikan pendapatnya.

5. Faktor Penghambat Demokrasi di Universitas PGRI Palembang

Adapun cara yang ditempuh untuk mengubur kekritisn mahasiswa, pihak kampus dalam hal ini adalah rektorat, biasanya akan memperketat kebijakan akademik dan membuat bagaimana mahasiswa merasa *enjoy* dengan sejumlah aktivitas di kampus. Sejumlah acara seperti pertunjukan musik atau acara yang bersifat *entertainment* akan menjadi suatu acara yang pasti menyedot banyak mahasiswa. Ketika mereka berjingkrak-jingkrak menikmati alunan musik, mereka lupa bahwa masyarakat di luar kampus membutuhkan peranan mereka untuk bersama-sama melakukan perubahan menuju iklim yang lebih baik.

Aktivitas-aktivitas yang sifatnya politis seperti demonstrasi, orasi Demokrasi ilmiah dan aktivitas kritis lainnya selalu mendapat respon negatif dari pihak birokrat. Pada penelitian ini telah ditemukan beberapa metode melalui pengamatan lapangan yang digunakan oleh pihak universitas untuk meredam aktivitas kritis mahasiswa yakni sebagai berikut.

- a) Memperketat absensi (kuantitas kehadiran mahasiswa) minimal 80% kehadiran selama satu semester. Jika dalam satu semester absensi mahasiswa di bawah 80%, mahasiswa tersebut dilarang untuk mengikuti ujian final.
- b) Mempersulit mahasiswa yang kritis dalam pengurusan administrasi akademik.
- c) Merepresi nilai bagi mahasiswa yang berseberangan pendapat dan pemikiran dengan dosen atau mahasiswa yang kritis di kampus. Biasanya birokrat kampus atau dosen.
- d) Memberikan nilai tidak objektif terhadap mahasiswa yang kritis.
- e) Pemecatan status kemahasiswaan secara sepihak (*skorsing*). Kebijakan tersebut membuat tujuan pendidikan yang seharusnya membebaskan manusia dari ketertindasan justru berlangsung sebaliknya.
- f) Pembatasan waktu dan tempat belajar bagi mahasiswa dengan jangka waktu tertentu. Hal ini sangat bertentangan dengan fungsi dari universitas pendidikan yakni sebagai wadah untuk belajar dan pengembangan jati diri setiap orang. Dengan kebijakan pembatasan waktu maka proses untuk mengembangkan diri pun jadi terhambat.
- g) Kebijakan *drop out* kepada aktivis mahasiswa yang masa studinya telah melewati jangka waktu tertentu tanpa mempertimbangkan sebab akibat dari hal tersebut. Ada beberapa faktor yang menyebabkan mahasiswa melampaui masa studinya, diantaranya faktor ekonomi dan faktor psikologis dari mahasiswa itu sendiri.

Hal tersebut di atas, sejalan dengan artikel yang telah ditulis oleh Prihatiyani (2004) mengemukakan ada lima macam metode yang telah dilakukan oleh birokrat kampus untuk meredam aktivitas kritis mahasiswa, yaitu: *Pertama*, memperketat absensi. *Kedua*, merepresi nilai mahasiswa yang berseberangan pendapat dengan dosen atau pihak universitas. *Ketiga*, Membuat perjanjian tertulis diatas materai secara sepihak tanpa didialogkan terlebih dahulu kepada mahasiswa. Salah satu isi perjanjiannya tidak boleh terlibat dalam aktivitas Demokrasi praktis seperti unjuk rasa tentang permasalahan kampus. Dengan alasan kampus adalah wadah untuk mencari ilmu bukan sebagai tempat berDemokrasi. *Keempat*, merepresi psikologis mahasiswa yang kritis dengan sanksi sepihak dan memanggil orang tua wali. Dengan begitu kontradiksi yang dihadapi mahasiswa menjadi luas. Yang tadinya hanya berkontradiksi dengan pihak birokrat kampus meluas dengan keluarga. Sehingga banyak aktivis mahasiswa yang terdemoralisasi, dengan sendirinya tidak menjadi kritis lagi. *Kelima*, pemecatan status kemahasiswaan secara sepihak (*skorsing*) (Eny, 2004).

6. Upaya Menghidupkan dan Mempertahankan Demokrasi

Demokrasi di suatu universitas sangat dibutuhkan, oleh karena itu diperlukan upaya agar Demokrasi di Universitas PGRI Palembang dapat dipertahankan dan berjalan sesuai dengan harapan dari semua pihak, baik pihak universitas maupun mahasiswa. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba mendeskripsikan beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pihak universitas untuk

mempertahankan Demokrasi mahasiswa di Universitas PGRI Palembang yang ditemukan melalui pengamatan lapangan.

- a) Memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk mengekspresikan dirinya melalui kegiatan demonstrasi. Hal ini dapat melatih *vocal* dan analisis mahasiswa dalam berbicara dihadapan khalayak ramai.
- b) Melibatkan pihak mahasiswa dalam hal pengambilan kebijakan oleh pihak universitas. Sehingga tidak terjadi kontroversi antara pihak universitas dengan mahasiswa selaku objek yang akan menjalankan kebijakan tersebut.
- c) Memberikan fasilitas kepada mahasiswa dalam melakukan kegiatan-kegiatan ekstra maupun intra kampus, terutama dalam kegiatan-kegiatan yang berorientasi dimasyarakat, seperti “Bakti Sosial kepada masyarakat”.
- d) Memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk mengaktualisasikan minat dan bakat yang dimiliki oleh mahasiswa, dengan tidak membatasi waktu dan tempat.
- e) Pihak universitas harus bersikap objektif dalam memberikan penilaian kepada mahasiswa sesuai dengan kemampuannya dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi sistem penilaian.
- f) Memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk melakukan kegiatan keorganisasian, tanpa harus mengintervensi hal-hal yang menjadi hak dan kewajiban mahasiswa selaku pengurus dalam Organisasi Mahasiswa (ORMAWA) itu sendiri.
- g) Menyediakan program-program yang dapat membantu percepatan studi mahasiswa, sehingga mahasiswa dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, tanpa harus mengeluarkan kebijakan untuk *drop out* kepada mahasiswa yang telah melewati jangka waktu masa studinya.

Hasil penelitian ini kiranya dapat menggambarkan upaya untuk menghidupkan dan mengembangkan demokrasi mahasiswa di Universitas PGRI Palembang, kiranya juga menciptakan situasi yang aman dan kondusif untuk mahasiswa yang melaksanakan demokrasi. Demokrasi ini akan membuat dampak perubahan bagi mahasiswa untuk berani menyuarakan hak mereka di depan publik, Sehingga mahasiswa terasah kemampuannya baik itu kreatifitasnya untuk perubahan atau revolusi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti melakukan survey ke beberapa ORMAWA tentang Konsep demokrasi mahasiswa Universitas PGRI Palembang. Didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

- a) Demokrasi mahasiswa belum berkembang di karenakan kebebasan mahasiswa berpendapat untuk mengeluarkan ide-idenya kurang direspon oleh universitas PGRI Palembang. Ini dapat dilihat susahny birokrasi kepada organisasi mahasiswa.

- b) Ketidakpedulian universitas terhadap organisasi mahasiswa
- c) Kurangnya sokongan dana kepada setiap ORMAWA yang melaksanakan kegiatan keorganisasiannya
- d) Susahnya birokrasi ormawa untuk melaksanakan kekeatan organisasinya.
- e) Adanya acaman dari universitas kepada oemawa untuk melaksanakan demokrasi kampus.
- f) Sikap pihak universitas dalam hal ini rektorat yang selalu berusaha menghilangkan dan mengubur kekritisn mahasiswa di Universitas PGRI Palembang dengan berbagai cara dan metode
- g) Kegiatan ORMAWA tidak di dukung dengan masikmal atau mendapat respon negatif oleh pihak birokrasi, contohnya aktivitas-aktivitas yang sifatnya politis seperti demonstrasi, Orasi Demokrasi ilmiah dan aktivitas kritis lainnya seperti bakti sosial dimasyarakat,
- h) Pihak universitas memperketat kebijakan akademik yang dimaksudkan untuk membuat mahasiswa sibuk dan terbuai dengan kegiatan-kegiatan *entertainment*, sehingga tidak peduli lagi akan eksistensinya dimasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlin dan Harto, Syafri. (2012) “*Pemetaan Sikap Demokratis Mahasiswa Baru Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau Tahun 2012*” Jurnal FISIP UNRI, Vol. 7, No. 2
- Ali, Mohammad. (2009). *Pendidikan untuk pembangunan nasional: menuju bangsa Indonesia yang mandiri dan Berdaya Saing Tinggi*. Jakarta : Grasindo.
- Basyaib, Hamid. (2006). *Membela kebebasan: percakapan tentang demokrasi liberal*. Jakarta : Pustaka Alvabet.
- Fadhilah dan Nuraina. (2011). “*Penerapan Demokrasi Di Lingkungan Gerakan Mahasiswa UNISMA Bekasi*” Jurnal Kybernan, Vol. 2, No. 2
- Hardiman, F. Budi. (2007). *Filsafat Fragmentaris : Deskripsi, Kritik, dan Dekonstruksi*. Yogyakarta : Kanisius.
- Hardiman, F. Budi. (2010). *Ruang Publik*. Yogyakarta : Kanisius.
- Haris, Syamsuddin (ed). (2007). *Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*. Jakarta : Lipi.
- Hasse, J. (2012). “*Anarkisme Demonstrasi Mahasiswa : Studi Kasus Pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*” Jurnal Studi Pemerintahan, Vol. 3, No. 1
- Kountur, Ronny. (2007). *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis (Edisi Revisi)* Jakarta : PPM.
- Laksono, Hari W (ed), *Daniel: SBY Berduka atas Meninggalnya Sondang*, <http://www.kompas.com>, Akses tanggal 1 april 2014.
- Mulder, Niels. (2005). *Wacana publik Asia tenggara: menuju masyarakat madani*. Yogyakarta : Kanisius.
- Prahatmaja, Nurmaya. (2004). *Perilaku Pengguna dalam Mencari dan Pemanfaatan Informasi di Pusat Dokumentasi Solopos*. Bandung: Fakultas Komunikasi Universitas Padjadjaran. Skripsi tidak dipublikasikan.
- Prihatiyani, Eny. (2004) *Artikel Sistem Pendidikan dan Politik Mahasiswa*. Fakultas ISIP Universitas Negeri Gorontalo
- Rangkuti, Freddy. (1997). *Riset Pemasaran*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
- Sudibyo, Agus. (2001). *Politik Media dan Pertarungan Wacana*. Yogyakarta : Lkis.
- Sugiyono. (1999). *Metoda Penelitian Bisnis*. Bandung : CV. Alfabeta
- Tugiyono Ks, (et al). (2004). *Pengetahuan Sosial Sejarah 2*. Jakarta : Grasindo.